

---

## Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Provinsi Maluku Utara

Asriani La Olu

Prodi S1 Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : [asrianiolaolu@gmail.com](mailto:asrianiolaolu@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 24 Juni 2023

Revised: 09 Juli 2023

Accepted: 10 Juli 2023

**Keywords:** Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan.

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Provinsi Maluku Utara dikaji dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa 1) Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal, dibuktikan dengan masih adanya golongan masyarakat belum sejahtera; 2) Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari akses masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal, dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang belum dapat mengakses internet sebagai media belajar; 3) Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari kesadaran kritis masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal, dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang kurang sadar untuk melibatkan dirinya dalam program pemberdayaan masyarakat desa; 4) Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal, dibuktikan dengan masih adanya unsur masyarakat yang belum dilibatkan dalam Musrenbangdes; 5) Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari kontrol masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal, dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang sampai dengan saat ini masih memiliki kesulitan dalam mengakses informasi penyelenggaraan Pemerintah Desa.

---

### PENDAHULUAN

Administrasi publik bertujuan meningkatkan tanggung jawab kebijakan untuk memenuhi

kebutuhan publik yang berbeda, lebih memahami hubungan antara pemerintah dan publik, melembagakan praktik manajerial, sehingga masyarakat terbiasa melakukan suatu kegiatan secara efektif, efisien, dan logis (Pasolong (2019:1). Salah satu dimensi strategis administrasi publik adalah dimensi lingkungan (Keban, 2019:15) dimana lingkungan sosial terdiri dari individual maupun kelompok yang berinteraksi satu sama lain. Lingkungan sosial lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat, alasannya karena lingkungan sosial lebih spesifik membahas tentang interaksi suatu individu maupun kelompok. Oleh karena itu, faktor lingkungan yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang sangat berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Hal ini sebagai perwujudan mandat dalam rangka mengimplementasikan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memberdayakan masyarakat desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa, meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan mengakui dan mengfungsikan institusi asli dan/ atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa memegang peranan yang penting dalam upaya membangun kemandirian penduduk desa. Kemandirian tersebut dalam arti mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan merupakan sebagai sebuah proses atau cara, atau pun juga sebagai suatu perbuatan untuk menuju berdaya. Pengertian proses tadi merujuk pada serangkaian tindakan yang dapat dilakukan secara sistematis dan bertahap. Serangkaian tindakan ini tentunya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan atau kemandirian. Pemberdayaan dalam perspektif ilmu sosial sering diartikan sebagai ikhtiar guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh suatu individu atau kelompok masyarakat atau juga masyarakat. Masyarakat sendiri (community/ society) terdiri dari individu-individu dalam suatu wilayah yang spesifik, memiliki ikatan kebersamaan dan saling berinteraksi secara sosial. Pemenuhan kebutuhan masyarakat ini termasuk didalamnya tingkat aksesibilitas terhadap sumber daya dan aktivitas sosial lainnya. Intinya pemberdayaan menjadi sarana dan suatu proses meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat (Ambarsari, dkk, 2022:1)

Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pemberdayaan yang dibutuhkan masyarakat untuk menanggulangi tingkat angka kemiskinan dimana hingga saat ini pemberdayaan masyarakat untuk program penanggulangan kemiskinan masih dikoordinasikan dalam tiga klaster program, yaitu kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, kelompok program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin (Hakim, 2019:1).

Konsep UNICEF dalam Lesnussa (2019:99-100) mengenai pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dengan menggunakan bahwa 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari 1) kesejahteraan yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan, 2) akses menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya, 3) kesadaran kritis berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah, 4) partisipasi masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka

kepentingan mereka tidak terabaikan, dan 5) kontrol dimana masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan upaya penanggulangan masalah kemiskinan yang merupakan masalah pembangunan yang multidimensional. Beberapa penelitian menunjukkan pemberdayaan masyarakat di Indonesia belum optimal dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini dapat dilihat secara umum masalah dalam pemberdayaan masyarakat yang tingkat kesejahteraan belum tercukupi misalnya tingkat pendidikan, kesehatan, pangan dan sandang, kurang adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya, adanya diskriminasi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, maupun masyarakat kurang diberikan kesempatan untuk mengendalikan dan mengelolah sumber daya yang ada (Margayaningsih, 2016; Lesnussa, 2019:99-100).

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi strategi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melalui strategi pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat berpartisipasi mulai dari identifikasi kebutuhan, proses program sampai kepada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Penelitian ini mengenai pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu itu sendiri dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Meskipun demikian, masih adanya angka kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara menunjukkan pencerminan dari pencapaian berbagai program pemberdayaan masyarakat desa untuk menanggulangi kemiskinan yang didukung oleh berbagai upaya sinergi pusat dan daerah yang belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari data penduduk kategori miskin di Kecamatan Taliabu Utara pada Tabel 1. berikut:

**Tabel 1. Data Penduduk Miskin Kecamatan Taliabu Utara**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk Miskin (Jiwa)
2018	1459	343
2019	1440	336
2020	1390	334
2021	1586	480

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu, 2023*

Dilihat dari Tabel 1. di atas tingkat kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019 dan 2020 menurun namun pada tahun 2021 meningkat drastis, sehingga pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, melakukan evaluasi dan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara termasuk di Desa Tikong terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Adanya jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan mengindikasikan program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara.

Program pemberdayaan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara secara umum adalah Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi tepat Guna untuk Pertanian/ Pertenakan yang sudah

terlaksana bagi ibu-ibu yang ada di desa. Bentuk pemberdayaan tersebut lebih lanjut dilakukan Pemerintah Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara dengan memberikan lahan untuk dimanfaatkan sebagai kebun semua tanaman sayuran baik buah maupun tanaman obat. Hasil dari kebun tersebut dijual di pasaran, sehingga ada dana untuk desa dan masyarakat juga bisa memanfaatkan hasil panen tersebut. Namun, program pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dari 19 desa yang ada Kecamatan Taliabu Utara sudah terlaksana di 10 desa, sementara 9 desa lain termasuk di Desa Tikong masih belum optimal dalam pencapaian targetnya. Demikian halnya untuk program pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara juga sampai saat ini belum optimal dalam pencapaian targetnya. Upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara nampaknya belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan untuk mengurangi kemiskinan.

Permasalahan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara dapat dilihat dari beberapa indikator. Dalam penelitian ini permasalahan dilihat berdasarkan konsep UNICEF dalam Lesnussa (2019:99-100) mengenai pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yaitu menyangkut masalah kesejahteraan, akses, kesadaran masyarakat, partisipasi, dan kontrol. Konsep ini dipilih karena relevan dengan masalah pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

Wawancara awal dengan beberapa masyarakat desa yang ada di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara menunjukkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara kurang baik karena ada masyarakat yang mengatakan kurangnya kesejahteraan masyarakat yang tidak tercukupinya kebutuhan dasar sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Pengamatan awal menunjukkan masih ada masyarakat yang kekurangan makanan, adanya keluarga dengan anak memiliki gizi buruk, bahkan masih ada yang dalam sehari belum bisa memenuhi kebutuhan makanannya. Selain itu, masih ada masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.

Akses masyarakat Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara terhadap sumber daya juga kurang baik karena tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki masyarakat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka di kelas rendah. Mereka yang lebih sejahtera memiliki akses lebih terhadap sumber daya. Sebagai contoh dapat diamati dalam pengamatan awal bahwa kemudahan masyarakat Desa Tikong dalam mengakses pendidikan masih kurang dimana siswa yang dapat mengakses internet sebagai media belajar hanya siswa yang berasal dari keluarga mampu, sedangkan untuk siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu belum dapat mengakses internet sebagai media belajar. Sementara itu, Pemerintah Desa, Kecamatan, atau Kabupaten belum memberikan bantuan untuk siswa yang kurang mampu baik berupa beasiswa maupun bantuan sarana belajar berupa tambahan buku dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa masyarakat juga diketahui bahwa kesadaran masyarakat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara kurang baik karena ada masyarakat yang mengatakan kurangnya kesadaran kritis masyarakat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun sudah ada aturan mengenai pemberdayaan masyarakat, namun masyarakat masih ada yang kurang sadar untuk melibatkan dirinya dalam program pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai contoh, ketika ada kegiatan pembangunan jalan desa masih ada masyarakat yang tidak melibatkan dirinya dalam kegiatan tersebut, padahal sudah ada pemberitahuan dari pihak Pemerintah Desa mengenai jadwal pelaksanaan pekerjaan

membangun jalan desa.

Wawancara awal menunjukkan partisipasi masyarakat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara kurang baik karena ada masyarakat yang mengatakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian kepentingan mereka terabaikan. Sebagai contoh, masih ada unsur masyarakat yang merasa keberatan tidak diundang untuk mengikuti musyawarah tingkat dusun atau desa, padahal unsur masyarakat tersebut memiliki beberapa saran dan ide mengenai hal-hal untuk mengembangkan desanya. Musrenbangdes hanya dihadiri oleh Pemerintah Desa dan masyarakat diwakili oleh Kepala Dusun, sementara ada tokoh masyarakat yang merasa perlu dilibatkan dalam musyawarah tersebut minimal pada tingkat dusun.

Selain itu, kontrol masyarakat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara sesuai wawancara awal menunjukkan belum baik karena ada masyarakat yang mengatakan mereka belum mendapatkan hak-haknya dan juga belum menikmati sumber daya serta belum bisa mengelolah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara. Sebagai contoh, masyarakat sampai dengan saat ini masih memiliki kesulitan dalam mengakses informasi penyelenggaraan Pemerintah Desa baik menyangkut realisasi penggunaan dana desa, dan hal lainnya. Jadi kontrol masyarakat untuk mengawasi jalannya penggunaan dana desa di Desa Tikong masih rendah.

Melihat permasalahan di atas diperlukan tindakan pemberdayaan masyarakat agar biasa meningkatkan potensi masyarakat dalam berpartisipasi menjalankan program Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara yang telah disepakati. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **LANDASAN TEORI**

### **Administrasi Publik**

Menurut Nigro & Nigro dalam Keban (2022:6) administrasi publik adalah usaha kerja sama kelompok dalam lingkungan publik, yang meliputi tiga cabang: yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Ketiga cabang ini sangat berperan dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik. Pada konsep ini, penekanan lebih ditempatkan pada prosedur kelembagaan, khususnya pada bagaimana proyek kerjasama kelompok bersifat publik.

Menurut Dimock dalam Rodiyah, dkk (2017:11) ruang lingkup administrasi publik lebih besar daripada administrasi umum. Dimana administrasi publik meneliti ilmu tentang bagaimana organisasi terkecil sekalipun seperti keluarga hingga PBB, Karena administrasi publik adalah subbidang ilmu politik, itu mempengaruhi kebijakan suatu negara. Oleh karena itu, ada dua prasyarat untuk mempelajari administrasi publik. Prasyarat pertama adalah memiliki pengetahuan administrasi umum.

Pasolong (2019:1) mengemukakan tujuan administrasi publik adalah meningkatkan tanggung jawab kebijakan untuk memenuhi kebutuhan publik yang berbeda, lebih memahami hubungan antara pemerintah dan publik, melembagakan praktik manajerial sehingga masyarakat terbiasa melakukan suatu kegiatan secara efektif, efisien, dan logis.

### **Dimensi Lingkungan dalam Administrasi Publik**

Ruang lingkup administrasi publik menurut Keban (2019:15), yaitu meliputi: (1) Kebijakan, (2) Organisasi, (3) Manajemen, (4) Moral dan etika, (5) Lingkungan, dan (6) Akuntabilitas Kinerja.

Menurut Robbins dalam Keban (2019:211) istilah lingkungan mengacu pada semua elemen yang ada di luar organisasi atau batas fisiknya. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum, yang memiliki dampak tidak langsung atau kurang langsung pada organisasi, seperti faktor politik,

ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, dan lingkungan khusus, yang memiliki dampak langsung yang dirasakan, seperti klien, vendor, pesaing, pemerintah, pekerja, asosiasi perdagangan, dan kelompok penekan.

Soekanto dalam Legowo & Setyawan (2022:1) mengategorikan lingkungan hidup ke dalam kelompok-kelompok sebagai berikut: 1) Lingkungan fisik di sekitar manusia, termasuk semua benda mati, 2) Lingkungan biologis atau segala sesuatu yang hidup dan ada di sekitar manusia (manusia juga termasuk di dalamnya), 3) Lingkungan sosial terdiri dari individual maupun kelompok yang berinteraksi satu sama lain.

### **Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Maryani & Nainggolan (2019:8) pemberdayaan masyarakat adalah proses pertumbuhan yang mendorong sekelompok orang untuk melakukan kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan pribadi mereka. Hanya ketika masyarakat secara keseluruhan berpartisipasi barulah dapat terjadi pemberdayaan komunal yang sejati. Oleh karena itu, proses pembangunan dan pemberdayaan adalah dua istilah yang berkaitan. Memperbaiki kondisi situasi melalui aksi masyarakat. Dengan kata lain, efektivitas suatu program atau kegiatan yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata tergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga pada seberapa aktif pihak yang diberdayakan bekerja untuk memperbaiki keadaan.

Yunus, dkk (2017:6) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat mengacu pada proses yang memungkinkan dan memotivasi orang untuk menempatkan diri pada posisi yang proporsional dan memimpin dalam memanfaatkan lingkungan strategis untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, dimana hal itu merupakan prasyarat yang sangat penting dan dapat diibaratkan sebagai suatu kendaraan yang akan membawa masyarakat menuju ekonomi yang berkelanjutan, tatanan sosial yang stabil, dan lingkungan yang dinamis.

Chambers dalam Hamid (2018:10) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial. Gagasan ini mencerminkan paradigma pembangunan yang segar, berkelanjutan, berpusat pada manusia, dan partisipatif. Konsep yang pemikirannya akhir-akhir ini lebih banyak dieksplorasi sebagai upaya untuk mengidentifikasi alternatif konsep pertumbuhan di masa lalu, lebih besar dari sekedar penyediaan kebutuhan pokok atau menyediakan mekanisme untuk mencegah pemiskinan yang lebih besar (*safety net*)

### **Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat**

UNICEF dalam Lesnussa (2019:99-100) mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi:

#### **a. Kesejahteraan**

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

#### **b. Akses**

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya

kesetaraan akses terhadap sumber daya yang di punyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

c. Kesadaran kritis

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.

d. Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.

e. Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

### **Konsep Kemiskinan**

Siahaan dalam Fatmasari (2015:46) menjelaskan kemiskinan adalah kondisi masyarakat ketika kebutuhan dasar sehari-hari tidak terpenuhi. Di antaranya adalah makanan yang tidak dapat diakses, nutrisi yang tidak memadai, air yang tidak memenuhi standar kesehatan, masalah perumahan, tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, layanan sosial yang sangat tidak memadai, transportasi yang tidak dapat diandalkan, dan masalah lainnya. Menurut Salim dalam Fatmasari (2015:46), menanggung kekuatiran, ketidakbahagiaan, atau kemelaratan dalam hidupnya adalah kemiskinan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Menurut Friedman dalam Mujahidin (2017:15) memberikan definisi kemiskinan yang lebih detail. Kemiskinan sebagai kesempatan untuk akumulasi kekuatan sosial. Komponen pertama dari basis kekuatan sosial adalah modal produktif atas aset, seperti *real estat*, mesin, dan kesehatan. Yang kedua adalah akses ke kredit dan pendapatan yang memadai. Ketiga, struktur sosial dan politik yang dapat dieksploitasi untuk memajukan tujuan bersama. Keempat, jaringan atau jaringan sosial untuk mencari pekerjaan, produk, informasi, dan kemampuan yang cocok. Keenam, informasi yang meningkatkan kehidupan.

Yusri (2022:18-25) beberapa teknik pengukuran yang digunakan dalam menetapkan indikator kemiskinan:

- a. Teknik menghitung asupan kalori harian per individu.
- b. Metode penghitungan pendapatan yang setara dengan nilai tukar beras per kapita tahunan
- c. Metode Pengukuran Berbasis Kesejahteraan Keluarga
- d. Teknik Pengukuran Besaran Pendapatan
- e. Pendekatan untuk Menilai Kepuasan Kebutuhan Berdasarkan Hak-Hak Dasar.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif

subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Desain penelitian kualitatif deskriptif ini bersifat umum ini bersifat umum, fleksibel dan berkembang dalam penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan menggambarkan kenyataan bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

### **Data dan Sumber Data**

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yaitu informan kunci yang menjadi sumber informasi di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

#### **2. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang untuk melengkapi data dan informasi primer, dikumpulkan melalui telaah dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi model Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2018:246).

#### **1. Reduksi data**

Dengan cara berproses dimulai dengan pemilihan, memusatkan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data kasar ke catatan lapangan yang bertujuan untuk memberikan ketajaman data, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan, serta pengorganisasian data, sehingga kesimpulan final dan verifikasi data dapat dilakukan oleh peneliti.

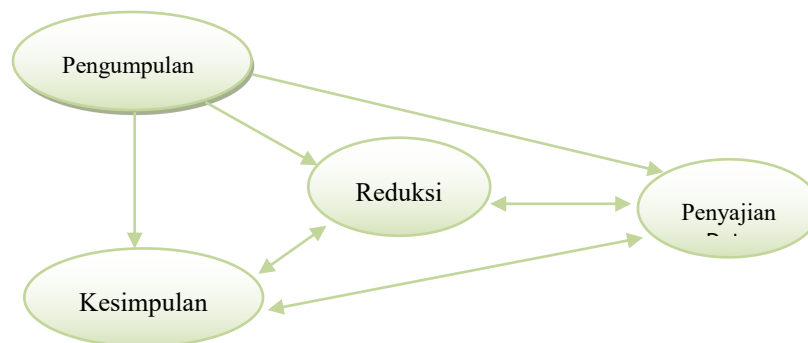
#### **2. Penyajian data**

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan sekumpulan susunan informasi tentang pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti menampilkan dan membuat hubungan antar variabel menjadi susunan data yang relevan dengan fokus penelitian.

#### **3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data**

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan beberapa informasi berupa kata kunci dari setiap bagian pertanyaan penelitian, sehingga peneliti menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut. Verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang atau peninjauan kembali pada data yang telah dikumpulkan serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan hasil temuan. Verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung dimulai saat memasuki lapangan sampai pada penyajian data untuk menguji kekokohan dan kecocokan data yang merupakan validitasnya.

Rangkaian proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data dalam model *interactive* di atas dapat dikonstruksikan sebagaimana tampilan Gambar 1. sebagai berikut:



**Gambar 1. Teknik Analisis Data Menurut Miles & Huberman**

Sumber: Sugiyono (2018:246)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memaparkan berbagai data temuan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara dibahas berdasarkan 1) kesejahteraan, 2) akses, 3) kesadaran kritis, 4) partisipasi, dan 5) kontrol.

#### 1. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

Hasil penelitian mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Tikong digambarkan dari penjelasan sebagai berikut:

“Tingkat kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari sandang, papan dan pangan rata-rata masyarakat sudah tercukupi dengan baik. Tingkat ketercukupan sudah cukup baik. Rata-rata kelas menengah bahkan lebih di atas lagi walaupun ada yang dikalangan menengah kebawah. Pendidikan juga baik untuk di Desa Tikong Sembilan puluh persen sampai Pendidikan S1. Namun tingkat kesehatan belum terlalu memadai” (HK/10 April 2023).

Adapun pendapat masyarakat mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Tikong sebagai berikut:

“Untuk kebutuhan pakaian, makanan, rumah layak huni, kemudian penghasilan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat ini variatif keadaannya. Ada memang yang sudah tercukupi, namun ada juga yang belum tercukupkan” (LS/12 April 2023).

Gambaran hasil wawancara di atas menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara yang jika diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar berupa sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan dalam keadaan, maka dapat dikatakan secara umum sudah mencukupi. Namun demikian, masih terdapat golongan masyarakat yang dalam aspek-aspek tersebut belum tercukupi kebutuhannya.

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan sub fokus pertama penelitian ini

bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya golongan masyarakat belum tercukupi kebutuhan dasar sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

## **2. Akses**

Akses menyangkut kesetaraan masyarakat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara dalam mengakses sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya.

Hasil penelitian mengenai akses masyarakat di Desa Tikong digambarkan dari penjelasan sebagai berikut:

“Masyarakat yang ada di Desa Tikong memiliki sumber daya dengan seperti lahan. Dengan lahan ini masyarakat dapat bercocok tanam dengan berbagai jenis tanaman, tidak jarang masyarakat mendapat bantuan bibit tanaman dari pemerintah. Hal ini juga merupakan bagian dari bentuk perhatian Pemerintah terhadap permasalahan kemiskinan” (HK/10 April 2023).

Penjelasan di atas diuraikan oleh informasi sebagai berikut:

“Untuk sumber daya alam pemanfaatannya masyarakat sendiri yang memanfaatkan SDA dan SDM, tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Manfaat yang diberikan dari sumber daya tersebut berupa kesejahteraan masyarakat seperti sandang dan pangan hasil panen dari lahan tersebut” (Z/11 April 2023).

Adapun pendapat masyarakat mengenai akses masyarakat Desa Tikong sebagai berikut:

“Akses terhadap sumberdaya umumnya hanya mengandalkan keterampilan mandiri, tenaga dan waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup dari mulai berkebun, melaut dan pekerjaan kasar lainnya. Sementara hasil dari sumberdaya tersebut umumnya hanya memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tahunan untuk petani yang menanam tanaman cengkih, pala, dan kakao” (LS/12 April 2023).

Gambaran hasil wawancara di atas menunjukkan masyarakat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sudah dapat mengakses sumber daya yang dipunyai masyarakat di desa utamanya akses terhadap pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan dimana masyarakat pemilik sawah dan kebun melakukan cocok tanam berbagai jenis tanaman tanpa ada campur tangan dari Pemerintah Desa kecuali bantuan berupa bibit tanaman. Hasil panen pertanian dan perkebunan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun demikian, akses terhadap berbagai sumber daya di Desa Tikong belum merata atau setara utamanya dalam mengakses sarana dan prasarana desa.

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan sub fokus kedua penelitian ini bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari akses masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal yang dibuktikan dengan masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses infrastruktur pelayanan kesehatan berkualitas, sarana pendidikan baik sekolah maupun internet sebagai media belajar, jalan desa, sumber listrik PLN maupun air bersih PDAM.

## **3. Kesadaran kritis**

Kesadaran kritis adalah pemahaman masyarakat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara terhadap kebijakan dan permasalahan sosial yang ada di desa dan bisa berpikir kritis untuk turut serta memecahkan masalah yang terjadi.

Hasil penelitian mengenai kesadaran kritis masyarakat di Desa Tikong digambarkan dari penjelasan sebagai berikut:

“Pada dasarnya kami selaku Pemerintah Desa selalu mendorong untuk bagaimana masyarakat ini memiliki kepedulian atau kesadaran dalam pembangunan di desa ini. Adanya kesenjangan yang terjadi ini memang menjadi tanggung jawab semua pihak yang ada di desa. Di satu sisi kami meneruskan berbagai program pengentasan kemiskinan dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Sudah ada sosialisasi. Namun barangkali pada sisi lain masyarakat belum tergugah memaksimalkan potensi yang ada di desa. Kesenjangan dalam kesejahteraan pada masyarakat di sini umumnya terjadi pada tingkat pendidikan yang juga di latar belakang oleh masalah ekonomi yang berbeda, namun ini juga tidak sampai berujung pada diskriminasi Pemerintah terhadap masyarakat” (HK/10 April 2023).

Informasi di atas diperkuat oleh pernyataan sebagai berikut:

“Usaha-usaha yang diantaranya dilakukan Pemerintah Desa Tikong dengan membuka lapangan pekerjaan untuk membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang masuk pada kategori miskin atau tingkat ekonomi rendah. Masyarakat sudah memanfaatkan peluang ini terutama dalam menggarap hasil pertanian dan perkebunan yang memang menjadi andalan desa ini” (R/11 April 2023).

Berdasarkan observasi penelitian program pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sudah dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat di Desa Tikong dalam hal meningkatkan kesadaran untuk selalu berupaya memperbaiki kesejahteraan dimana Pemerintah Desa Tikong juga sudah membentuk kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas) yang menjadi sasaran dari program tersebut. Dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang hal-hal yang terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan, sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya melakukan aktivitas untuk perbaikan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya program-program pemberdayaan masyarakat kecil tentunya dapat memberikan dampak pada peningkatan kesadaran mereka untuk selalu berusaha dalam memperbaiki kesejahteraan, karena dalam program pemberdayaan masyarakat ada kegiatan pembinaan, penerangan dan penyuluhan.

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan sub fokus ketiga penelitian ini bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari kesadaran kritis masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang kurang sadar untuk melibatkan dirinya dalam program pemberdayaan masyarakat desa seperti perbaikan jalan desa.

#### **4. Partisipasi**

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pembangunan di desa.

Hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat di Desa Tikong digambarkan dari penjelasan sebagai berikut:

“Kami selaku Pemerintah Desa telah berupaya agar bagaimana semua unsur masyarakat seperti PKK, karang taruna, ibu-ibu dasawisma dapat partisipasi dalam pembangunan desa. Hal ini dimulai dalam forum pertemuan di lingkungan desa untuk membahas kebutuhan masyarakat misalnya bagaimana untuk membangun usaha kecil. Masyarakat sudah dilibatkan dalam hal ini” (HK/10 April 2023).

Penjelasan di atas diperkuat oleh informasi sebagai berikut:

“Masyarakat sudah ikut serta dalam kegiatan musrenbang. Andil dalam memberikan masukan-masukan mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat terkait fasilitas di desa” (A/11 April 2023).

Informasi di atas diperkuat oleh pernyataan sebagai berikut:

“Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat tidak maksimal karena hanya sebagian kecil yang ikut adil dan berpartisipasi dan sebagian besar masyarakat lebih memilih melaksanakan kegiatan rutinitas” (RM/13 April 2023).

Berdasarkan observasi penelitian program pemberdayaan juga telah berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Tikong dalam pelaksanaan pembangunan di desa, karena masyarakat sudah ada yang dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tersebut. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan untuk kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok perempuan, dan lainnya. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Tikong sudah diikutsertakan masyarakat terutama mereka yang menjadi sasaran program tersebut.

Namun demikian berdasarkan observasi penelitian mengenai partisipasi masyarakat di Desa Tikong juga dapat dilihat masih ada unsur masyarakat yang merasa keberatan tidak diundang untuk mengikuti musyawarah tingkat dusun atau desa, padahal unsur masyarakat tersebut memiliki beberapa saran dan ide mengenai hal-hal untuk mengembangkan desanya. Musrenbangdes hanya dihadiri oleh Pemerintah Desa dan masyarakat diwakili oleh Kepala Dusun, sementara ada tokoh masyarakat yang merasa perlu dilibatkan dalam musyawarah tersebut minimal pada tingkat dusun.

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan sub fokus keempat penelitian ini bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya unsur masyarakat yang belum dilibatkan dalam Musrenbangdes.

## **5. Kontrol**

Kontrol merupakan pengawasan masyarakat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

Hasil penelitian mengenai kontrol masyarakat di Desa Tikong digambarkan dari penjelasan sebagai berikut:

“Masyarakat yang berada di desa ini dapat mengontrol pembangunan desa dengan baik. Mereka bisa melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Masyarakat juga pada dasarnya bisa lebih mandiri, sehingga untuk sumber daya alamnya bisa dikendalikan sendiri walaupun tanpa bantuan Pemerintah Desa.” (HK/10 April 2023).

Penjelasan di atas ditambahkan oleh informasi sebagai berikut:

“Masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap sumber daya yang ada di desa ini dimana kelompok masyarakat setempat dapat mengelola hasil alam di desa seperti dari hasil perkebunan masyarakat cengkeh, coklat, palah, dll. Selanjutnya ini dijadikan modal jual ke kota. Demikian halnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dapat mengelola rumput laut, ikan asin dll” (A/11 April 2023).

Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan selama ini dapat meningkatkan kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengelola sumberdaya yang mereka miliki untuk peningkatan kesejahteraan mereka, karena dari program pemberdayaan

itu masyarakat melalui pelatihan keterampilan masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha atau pekerjaan mereka dengan lebih baik. Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bolangitan dapat dirasakan secara adil oleh kelompok sasaran dari program itu. n,adanya program pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat desa untuk mengelola sumberdaya yang mereka miliki untuk peningkatan kesejahteraan mereka, karena dengan program ini masyarakat dapat mengelola kegiatan usaha/pekerjaan mereka dengan baik. Selama ini pemerintah desa sangat memperhatikan aspek keadilan dalam pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat dapat mengelola sumberdaya

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan sub fokus kelima penelitian ini bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari kontrol masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang sampai dengan saat ini masih memiliki kesulitan dalam mengakses informasi penyelenggaraan Pemerintah Desa baik menyangkut realisasi penggunaan dana desa, dan hal lainnya.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara dibahas berdasarkan 1) kesejahteraan, 2) akses, 3) kesadaran kritis, 4) partisipasi, dan 5) kontrol.

#### **1. Kesejahteraan**

Temuan penelitian mengenai kesejahteraan pada pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya golongan masyarakat belum tercukupi kebutuhan dasar sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Keadaan ini sejalan dengan temuan Lesnussa (2019) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa permasalahan pokok dalam pemberdayaan masyarakat adalah dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat kurang baik karena ada masyarakat yang tidak tercukupi dalam kebutuhan dasar sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dikatakan belum berhasil dengan baik jika tingkat kesejahteraan masyarakat juga belum maksimal.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Desa Tikong hendaknya bersinergi dengan Pemerintah Kecamatan Taliabu Utara, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Tikong, sehingga lebih berdaya dalam mencukupi kebutuhan dasar sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan dengan melakukan pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yaitu menciptakan program untuk mewujudkan Desa Tikong dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat, dan bersih baik jasmani dan rohani. Tindakan yang lebih penting adalah memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Tikong melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang selama ini terabaikan.

Hal di atas sejalan dengan Margayaningsih (2016:164) bahwa dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Memperhatikan pendapat tersebut, maka

tingkat kesejahteraan pada pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi hasil tani, jalan desa yang selama ini masih banyak yang belum teraspal, listrik untuk golongan masyarakat yang belum menggunakan listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di Desa Tikong, dimana terkonsentrasi untuk unsur masyarakat yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat Desa Tikong yang kurang berdaya, karena program-program umum yang selama ini berlaku seperti Bantuan Langsung Tunai tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Menurut Margayaningsih (2016:164) bahwa kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan, khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah. Oleh karena itu, dalam hubungan dengan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong, pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat di Desa Tikong adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama dalam wadah koperasi.

## **2. Akses**

Temuan penelitian mengenai akses pada pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara menggambarkan akses masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal yang dibuktikan dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses pendidikan masih kurang dimana siswa yang dapat mengakses internet sebagai media belajar hanya siswa yang berasal dari keluarga mampu, sedangkan untuk siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu belum dapat mengakses internet sebagai media belajar. Keadaan ini sejalan dengan temuan Lesnussa (2019) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa permasalahan pokok dalam pemberdayaan masyarakat adalah dilihat dari akses masyarakat kurang baik karena tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai masyarakat yang berada di kelas lebih tinggi di banding mereka di kelas rendah. Pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dikatakan belum berhasil dengan baik jika akses masyarakat terhadap sumber daya yang ada di desa juga belum maksimal.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Desa Tikong hendaknya bersinergi dengan Pemerintah Kecamatan Taliabu Utara, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya meningkatkan dalam upaya meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses pendidikan dengan menyediakan akses internet sebagai media belajar utamanya kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam mengakses internet sebagai media belajar. Selain itu, Pemerintah Desa, Kecamatan, atau Kabupaten hendaknya memberikan bantuan untuk siswa yang kurang mampu baik berupa beasiswa maupun bantuan sarana belajar berupa tambahan buku dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Margayaningsih (2016:164) bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.

Memperhatikan pendapat Margayaningsih (2016:164) mengenai keharusan adanya akses pada pemberdayaan dalam menanggulangi kemiskinan, maka sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat di Desa Tikong, paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu pertama adalah akses terhadap sumber daya yang dimiliki Desa Tikong. Kedua, akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien seperti ketersediaan informasi yang dapat diakses melalui internet. Ketiga, akses terhadap informasi pasar. Mayoritas masyarakat Desa Tikong sebagai petani mengharuskan produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti bahwa penyediaan sarana produksi antara lain penyediaan alat-alat dan perlengkapan pertanian, serta peningkatan keterampilan misalnya keterampilan teknologi pengolahan tanah bagi petani, kesemuanya perlu diimbangi dengan tersedianya pasar dari produk tersebut secara terus-menerus. Keempat, akses terhadap sumber pembiayaan seperti pengetahuan masyarakat terhadap sumber dana untuk pembangunan Desa Tikong. Sejalan dengan Ife dalam Zubaedi (2013:22) upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan stabilitas institusi. Kaitannya dengan penelitian ini adalah masyarakat diberdayakan dengan membuat institusi pendidikan, kesehatan, keluarga, dan keagamaan serta sistem kesejahteraan sosial, struktur politik, media, dan institusi lainnya menjadi lebih mudah diakses.

Menurut Yunus, dkk (2017:6) bahwa pemberdayaan masyarakat mengacu pada proses yang memungkinkan dan memotivasi orang untuk menempatkan diri pada posisi yang proporsional dan memimpin dalam memanfaatkan lingkungan strategis untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Kaitannya dengan hasil penelitian ini adalah pemberian akses pada pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan terhadap sumber daya yang ada yang akan membawa masyarakat Desa Tikong menuju ekonomi yang berkelanjutan, stabil, dan dinamis. Dengan demikian anggota masyarakat Desa Tikong didorong melalui kegiatan pemberdayaan untuk dapat mengakses atau menggunakan sumber daya Desa Tikong seefektif mungkin dan berpartisipasi aktif dalam mekanisme pembangunan yang ada di desa. Kesempatan memperoleh akses ke sistem sumber daya Desa Tikong tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Kesadaran kritis**

Temuan penelitian mengenai kesadaran kritis pada pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara menggambarkan kesadaran kritis masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang kurang sadar untuk melibatkan dirinya dalam program pemberdayaan masyarakat desa seperti perbaikan jalan desa. Keadaan ini sejalan dengan temuan Lesnussa (2019) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa permasalahan pokok dalam pemberdayaan masyarakat adalah dilihat dari kesadaran kritis masyarakat kurang baik karena kurangnya kesadaran kritis masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dikatakan belum berhasil dengan baik jika kesadaran kritis masyarakat desa terhadap jalannya pembangunan di desa juga belum maksimal.

Memperhatikan hal tersebut di atas bahwa tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan. Oleh

karenanya, Pemerintah Desa Tikong hendaknya meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dengan melakukan berbagai sosialisai atau edukasi rutin dan berkesinambungan kepada masyarakat melalui diskusi dan tidak semata-mata ceramah mengenai berbagai program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan di desa, sehingga masyarakat bisa mengetahui jadwal pelaksanaan pekerjaan di desanya, dan bisa termotivasi secara sadar untuk melibatkan dirinya dalam program pemberdayaan masyarakat desa seperti perbaikan jalan desa. Sebagaimana kajian Hakim (2019) bahwa pengetahuan masyarakat mengenai masalah pemberdayaan adalah suatu hal yang sangat dituntut untuk dimiliki oleh setiap masyarakat dan pemerintah kecamatan maupun desa.

Hal di atas sejalan dengan Margayaningsih (2016:164) bahwa pemberdayaan dimaksudkan agar setiap individu memiliki kesadaran, kemampuan, dan kepedulian untuk mengamankan dan melestarikan sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian kehidupan maupun keberlanjutan pembangunan yang bertujuan untuk terus-menerus memperbaiki mutu hidup. Memperhatikan hal tersebut, maka pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong hendaknya menjadi suatu proses yang menyeluruh yaitu suatu proses aktif antara Pemerintah Desa Tikong selaku motivator dan fasilitator, dan kelompok masyarakat Desa Tikong itu sendiri yang perlu diberdayakan kesadaran kritisnya melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka perlunya membangun kesadaran kritis dalam masyarakat Desa Tikong dalam bentuk penguatan kelembagaan, pendidikan politik, dan upaya-upaya advokasi. Hal ini juga untuk agar masyarakat Desa Tikong mampu menjawab problem ketergantungan bantuan dari Pemerintah Pusat, Daerah, maupun Kabupaten.

Sejalan dengan hal di atas, Hasan & Azis (2018:175) berpendapat bahwa tugas fasilitator pemberdayaan masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan pelajaran yang akan membantu masyarakat lokal menjadi lebih mandiri dalam pendekatan pemecahan masalah mereka. Jika dikaitkan dengan penelitian ini bahwa membangun kesadaran kritis masyarakat Desa Tikong terhadap berbagai aspek pembangunan desa melalui peningkatan pengetahuan masyarakat menjadi penting. Masyarakat Desa Tikong dapat meningkatkan kapasitas atau memiliki pengembangan kemampuan untuk berwacana dan berkesempatan untuk mengemukakan ide, saran ataupun gagasan untuk menjalankan pembangunan di desanya.

Guna mewujudkan hal tersebut di atas, Pemerintah Desa Tikong perlu menciptakan lingkungan yang kondusif, memperkuat kapasitas dan potensi masyarakat, memberikan perlindungan dari ketidakadilan, memberikan pengarahan dan dukungan, serta harus masuk dalam proses pemberdayaan masyarakat Desa Tikong yaitu mempertahankan kondisi kondusif agar tetap terjaga atau seimbang. Berbagai upaya ini dimaksudkan agar masyarakat Desa Tikong memiliki kesadaran kritis untuk tidak semata-mata bergantung pada bantuan Pemerintah. Hal ini sebagaimana Dwidjojoto dalam Bahri (2013:30) bahwa berbagai upaya pemberdayaan masyarakat pada gilirannya dimaksudkan agar kemampuan resiliensi masyarakat terwujud dalam cara yang lebih bermakna, bukan sebaliknya dimana masyarakat terjebak oleh rangsangan dan proses saat ini dalam lingkungan yang penuh ketergantungan.

#### **4. Partisipasi**

Temuan penelitian mengenai partisipasi pada pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau

---

Taliabu Provinsi Maluku Utara menggambarkan partisipasi masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya unsur masyarakat yang belum dilibatkan dalam Musrenbangdes. Keadaan ini sejalan dengan temuan Lesnussa (2019) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa permasalahan pokok dalam pemberdayaan masyarakat adalah dilihat dari partisipasi masyarakat kurang baik karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga seringkali kepentingan masyarakat juga terabaikan. Pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dikatakan belum berhasil dengan baik jika partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga belum maksimal.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Desa Tikong hendaknya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengidentifikasi tokoh-tokoh masyarakat yang penting di desa dan melibatkan mereka dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa Tikong bahkan dalam proses pembangunan itu sendiri. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri dimana tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan Maryani & Nainggolan (2019:8) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pertumbuhan yang mendorong sekelompok orang atau masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, proses pembangunan dan pemberdayaan di Desa Tikong dilakukan dengan memperbaiki kondisi situasi melalui aksi masyarakat. Dengan kata lain, efektivitas program atau kegiatan yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tikong tidak semata-mata tergantung pada Pemerintah Desa Tikong sebagai pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga pada seberapa aktif masyarakat Desa Tikong sebagai pihak yang diberdayakan bekerja untuk memperbaiki keadaan. Selaras dengan Chambers dalam Hamid (2018:10) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan yang partisipatif.

Hasil kajian penelitian Ambarsari & Darmadja (2022) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan berbasis komunitas dimana hal ini mempunyai dimensi strategis dalam menggali potensi dan pengembangan kapasitas masyarakat. Memperhatikan kajian tersebut, pemberdayaan masyarakat di Desa Tekong berbasis komunitas akan memberikan peran kepada masyarakat dalam berpartisipasi pada proses formulasi, implementasi, dan monitoring evaluasi terhadap kegiatan di wilayah desanya. Pelibatan komunitas lokal desa seperti karang taruna, kelompok dasa wisma, dan sebagainya akan membangun kontruksi sosial politik yang positif di masyarakat desa dengan semakin memperkuat proses musyawarah dan gotong royong masyarakat desa. Kemudian pada aspek ekonomi dan budaya, pemberdayaan masyarakat desa akan memperkuat peran masyarakat dalam berpartisipasi sebagai pelaku kegiatan di desa. Hal ini akan memperkuat aspek kultur sosial warga desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Menurut Ife dalam Zubaedi (2013:22) upaya pemberdayaan masyarakat harus didasari pengetahuan tentang ketidakberdayaan masyarakat merupakan hasil dari ketidakmampuan (*powerless*) masyarakat. Memperhatikan hal tersebut, maka partisipasi pada pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong dilakukan dengan memberi masyarakat pilihan untuk membuat keputusan sendiri atau kemungkinan untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian masyarakat Desa Tikong harus memiliki kemampuan menilai kebutuhan sendiri. Untuk itu dalam memberdayakan masyarakat, Pemerintah Desa Tikong hendaknya membantu masyarakat mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri,

mendorong masyarakat dalam kebebasan berekspresi secara kreatif melalui komunitas yang ada di desa tersebut.

### **5. Kontrol**

Temuan penelitian mengenai kontrol pada pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara menggambarkan kontrol masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang sampai dengan saat ini masih memiliki kesulitan dalam mengakses informasi penyelenggaraan Pemerintah Desa baik menyangkut realisasi penggunaan dana desa, dan hal lainnya. Keadaan ini sejalan dengan temuan Lesnussa (2019) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa permasalahan pokok dalam pemberdayaan masyarakat adalah dilihat dari kontrol masyarakat tidak baik karena masyarakat belum mendapatkan hak-haknya dan juga belum menikmati sumber daya serta belum bisa mengelolah sumber daya yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dikatakan belum berhasil dengan baik jika kontrol masyarakat juga belum maksimal.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Desa Tikong hendaknya meningkatkan kontrol masyarakat dimana masyarakat mendapatkan hak-haknya dengan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi penyelenggaraan Pemerintah Desa baik menyangkut realisasi penggunaan dana desa, dan hal lainnya baik melalui rapat, papan pengumuman, maupun media informasi lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ife dalam Zubaedi (2013:22) bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan masyarakat diberdayakan melakukan kontrol atas kegiatan ekonomi.

Terkait dengan kurang maksimalnya kontrol masyarakat Desa Tikong terhadap penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN, maka diperlukan kontrol pada pemberdayaan masyarakat dimana harus ada mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tikong. Sementara Pemerintahan Desa Tikong dituntut menyelenggarakan pemerintahannya secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa Tikong yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi kontrol diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas antara lain dalam PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai antara lain pemberdayaan masyarakat, sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan kontrol terhadap dana desa tersebut.

Menurut Lumaya, R. (2016) bahwa pelaksanaan fungsi kontrol masyarakat dapat ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan masyarakat Desa Tikong berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa Tikong serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan ataupun tertulis tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, masyarakat Desa Tikong berkewajiban untuk membangun diri dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

Dengan adanya peranan masyarakat Desa Tikong dalam melaksanakan fungsi kontrol, maka masyarakat desa tidak hanya menikmati apa yang menjadi kinerja pemerintah dalam pembangunan desa, melainkan dapat turut serta dalam membangun daerahnya. Fungsi kontrol atau pengawasan yang dilakukan masyarakat Desa Tikong adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun dari daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya golongan masyarakat belum tercukupi kebutuhan dasar sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.
2. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari akses masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal yang dibuktikan dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses pendidikan masih kurang dimana siswa yang dapat mengakses internet sebagai media belajar hanya siswa yang berasal dari keluarga mampu, sedangkan untuk siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu belum dapat mengakses internet sebagai media belajar.
3. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari kesadaran kritis masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang kurang sadar untuk melibatkan dirinya dalam program pemberdayaan masyarakat desa seperti perbaikan jalan desa.
4. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya unsur masyarakat yang belum dilibatkan dalam Musrenbangdes.
5. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dilihat dari kontrol masyarakat sudah terwujud namun belum maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang sampai dengan saat ini masih memiliki kesulitan dalam mengakses informasi penyelenggaraan Pemerintah Desa baik menyangkut realisasi penggunaan dana desa, dan hal lainnya.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti berterima kasih kepada jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo.

## DAFTAR REFERENSI

- Ambarsari, R., Dewi, R. K., & Darmadja, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(6), 630-637.
- Bahri. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*. Surabaya: Fam Publishing.
- Fatmasari. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Cirebon: Nurjati Press.
- Hakim, A. R. (2019). *Program pemberdayaan masyarakat dalam menekan angka kemiskinan di Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Hamid. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Hasan & Azis. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal)*. Makassar: Nur Lina.

- Keban. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Legowo & Setyawan. (2019). *Buku Ajar Sosiologi Lingkungan*. Semarang: Lakeisha.
- Lesnussa, J. U. (2019). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon. *Jurnal Sosio Sains*, 5(2), 91-107.
- Lumaya, R. (2016). Peranan Masyarakat dalam Melaksanakan Fungsi Kontrol terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ditinjau dari UU No.6 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 5(7).
- Margayaningsih, D. I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Publiciana*, 9(1), 158-190.
- Maryani & Naiggolan. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Mujahiddin. (2017). *Perempuan dan Kemiskinan: Strategi Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga*. Medan: Umsu-Press.
- Pasolong. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rodiyah, dkk. (2021). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi*. Surabaya: Umsida Press.
- Yunus, dkk. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Aceh: Bandar Publishing.
- Yusri. (2022). *Integrasi Kebijakan Regional dan Kemiskinan*. Medan: Umsu-Press.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.